

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani. Wilayah negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten atau kota, kecamatan dan desa. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup>

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah, terutama di pedesaan terpencil dan pedalaman.<sup>2</sup> Menurut UU No 32 tahun 2004, merupakan *self community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan

---

<sup>1</sup> Vindy Gunawan, "Pembangunan Jalan di Desa Sawangan", dalam jurnal Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Vol 1, No 7. 2016. h. 1.

<sup>2</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.1.

sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.<sup>3</sup>

Otonomi berarti kemandirian untuk menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri merupakan hal dan kebebasan setiap warga masyarakat tanpa melihat status politik internasional atau wilayah yang mereka huni. Ketentuan ini hanya berlaku bagi rakyat diberbagai wilayah yang belum merdeka secara politik, tetapi juga pada rakyat diberbagai negara yang merdeka dan berdaulat. Penentuan nasib dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal berarti rakyat dalam suatu negara yang berdaulat maupun yang masih bergantung pada negara, memiliki hak untuk menentukan kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya. Rakyat bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka sendiri.<sup>4</sup>

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, pembangunan memiliki pengertian sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan juga bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Keadaan yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>4</sup> Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 121.

serba terbatas seperti hal diatas tersebut berdampak pada masyarakat tempat yang merasa tertinggal dan tersisih dari daerah pusat pemerintahan kabupaten. Untuk itu pemerintah harus mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan tidak saja untuk masyarakat dan oleh masyarakat melainkan harus pula dipandu dengan bersama masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut pengamatan sementara peneliti yang terjadi di Desa Sukakarta, peran dari pemerintah Desa Sukakarta dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Beberapa infrastruktur desa rusak namun permasalahan pokok dari Desa Sukakarta yaitu pemabangunan infrastruktur jalan yang kurang merata. Sehingga perlu penanganan yang serius dari pemerintah desa. Dimana dalam keberlangsungan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa, dan perangkat desa. Yang mana peran dari aparat desa maupun masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa.

Pada realitanya masyarakat desa Sukakarta kebanyakan tidak merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Apalagi dalam pembangunan infrastruktur jalan, kondisi jalan Desa Sukakarta sangat memprihatinkan. Jalan dipenuhi dengan genangan air dan batu-batu koral berserakan. Sampai saat ini jalan belum diaspal, pembangunan infrastruktur jalan hanya dicor dan tidak bertahan lama disebabkan pembangunannya terkesan asal-asalan sehingga dalam waktu sebulan, dua bulan

---

<sup>5</sup> Jepri, " Peranan dalam jurna Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga", dalam jurnal Naskah Publikasi 2015, h. 9.

coran rusak kembali, pembangunan tidak merata satu jalan di bagi dua dan tengahnya dikosongkan. Pemerintah desa membangun jalan yang sekiranya berbahaya dilewati ketika musim hujan tiba, jalan tersebut diselimuti oleh tanah dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Jika dipaksakan untuk digunakan dapat menyebabkan keselamatan pengendaranya terancam.

Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada diwilayahnya.

Semua itu perlu penanganan secara serius dari pemerintah terutama pemerintah desa mengingat sangat pentingnya infrastruktur jalan bagi masyarakat Desa Sukakarta sebagai urat nadi dalam keseharian dan perekonomian masyarakat, karena sangat membantu memasarkan hasil pertanian mereka ke kota. Selain itu jika infrastruktur jalan yang bagus memudahkan masyarakat Desa Sukakarta dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keadaan ini sudah dialami masyarakat Desa Sukakarta sejak puluhan tahun yang lalu tepatnya sejak berdirinya Desa Sukakarta.

Peran aktif dari partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat maka tujuan pembangunan infrastruktur jalan tidak akan tercapai sebagai mana yang di harapkan. Partisipasi masyarakat Desa

Sukakarta sangat menentukan tentang keberhasilan pembangunan yang ada di desa. Baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam program pembangunan di Desa Sukakarta, dan tidak ditempuhnya musyawarah desa. Berangkat dari realita diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang peran aparat desa dalam pembangunan. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu: *Peran Aparat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Penelitian di Desa Sukakarta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur)*.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sebagai mana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang diteliti maka perlu identifikasi masalah tentang terkait judul diatas:

1. Pembangunan infrastruktur jalan tidak merata,
2. Pembangunan infrastruktur jalan dibagi menjadi dua dan tengahnya dibolongkan.
3. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat akan diadakannya pembangunan infrastruktur jalan.
4. Pembangunan infrastruktur jalan dikerjakan oleh aparat desa nya saja,
5. Tidak ditempuhnya tahapan musyawarah di tingkat desa (musdus dan musdes dan yang lainnya) sebagai bentuk proses awal tahapan perencanaan pembangunan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dapat disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan jalan sebelum dan sesudah adanya pembangun infrastruktur di Desa Sukakarta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana keterlibatan aparat desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukakarta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan aparat desa agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukakarta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebelum dan sesudah adanya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Aparat Desa Sukakarta dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukakarta.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan aparat desa agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sukakarta.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal yang dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis dengan melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu:

### **1.5.1. Kegunaan Akademis (Teoritis)**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memperluas khazanah pengetahuan dalam ilmu bidang sosial khususnya ilmu sosiologi. Terutama yang berkaitan dengan kajian infastruktur jalan sebagai bagian dari teori pembangunan, yang mana halnya pemerintah desa belum melakukan tugas dan perannya dengan baik dalam hal pembangunan infastruktur jalan.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi atau bahan masukan bagi peran aparat desa sesuai dengan per-Undang-undangan yang berlaku dalam peningkatan pembangunan infastruktur jalan di daerahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **1.6. Kerangka Pemikiran**

Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang tersiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Teori struktural fungsional melihat pemerintah desa sebagai bagian dari strukur sosial yang memiliki peran dan fungsi sendiri. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial,

fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Teori peran beranggapan bahwa seorang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti yang dikehendaki oleh orang lain. Dengan demikian identitas seseorang adalah dibentuk dalam rangka memberi respon dari perlakuan dan harapan orang lain. Dengan kata lain tindakan seseorang lahir sebagai produk dari bagai mana orang lain memperlakukan dirinya sekaligus sebagai hasil dari keinginannya sendiri sebagai mana supaya dapat diterima orang lain.

Peran atau peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Tidak ada kedudukan tanpa peran. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulannya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran seseorang dalam bermasyarakat diatur oleh norma-norma yang berlaku dimana individu tersebut tinggal. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinu dari keadaan tertentu pada keadaannya yang dianggap lebih baik. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka



pembinaan bangsa. Untuk itu implikasi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu ataupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan, dan saling menghargai.

Pemerintahan desa diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.

**Gambar 1.1.**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

